

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kurikulum Indonesia selama ini lebih mengedepankan pada aspek pengetahuan dibandingkan aspek lain terutama aspek keterampilan, dimana hal tersebut menjadi bumerang bagi keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibuktikan dengan berbagai persoalan degradasi nilai, moral, budi pekerti, watak, atau karakter dimana persoalan tersebut mampu menghambat pembangunan cita-cita luhur bangsa. Patokan dengan adanya degradasi ini diungkapkan oleh Arraiyyah dan Musfah (2016) dalam persoalan kolektif yang menimpa masyarakat Indonesia diantaranya: 1) tindakan kekerasan yang semakin meluas dan dengan mudah dilakukan sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah, 2) meluasnya sikap hipokrit (kemunafikan) yang ditunjukkan melalui kecenderungan kesalahan yang ditimpakan kepada orang lain sehingga menutup kelemahan dan kesalahan pada diri sendiri, 3) budaya *instant* dalam menggapai kesuksesan dengan mengabaikan prinsip dan kaidah moral, dan 4) pudarnya rasa malu atau rasa bersalah pada mereka yang melakukan tindakan pelanggaran, yang ditampilkan ekspresi *sumringah* melalui wawancara oleh media.

Perilaku kolektif ini sangat berpengaruh dan mudah ditiru bagi siswa karena ditunjang oleh media yang mudah untuk diakses. Persoalan yang sangat dekat dengan siswa ini contohnya menurunnya etika dan sopan santun para siswa baik terhadap guru maupun orangtua, meningkatnya ketidakjujuran siswa (seperti mencontek dan membolos), berkurangnya interaksi secara langsung, kurangnya empati terhadap orang lain akibat tontonan, opini serta pesan negatif yang terus menerus diserap melalui tayangan media sehingga menimbulkan mental *inferiority*, serta fanatisme terhadap Kpop (Sumarlika, 2015: hlm. 139).

Berdasarkan fakta-fakta moralitas yang telah disebutkan, bangsa dan negara Indonesia berada pada posisi kritis. Menurut Lickona dalam Wibowo (2012, hlm. 15-16) sebuah bangsa dalam ambang kritis jika memiliki tanda-tanda seperti (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja; (2) membudayanya ketidakjujuran; (3) sikap fanatik terhadap kelompok/ *peer group*; (4) rendahnya rasa hormat terhadap orang tua dan guru; (5) semakin kaburnya moral baik dan buruk;

(6) penggunaan bahasa yang memburuk; (7) meningkatnya perilaku yang merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol dan seks bebas; (8) rendahnya rasa tanggungjawab sebagai individu dan warga negara; (9) menurunnya etos kerja; dan (10) adanya rasa saling curiga dan kurangnya kepedulian antara sesama.

Dalam rangka mencapai generasi muda yang unggul maka terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan adanya pergantian kurikulum yang menekankan pada berbagai aspek yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Perubahan kurikulum yang terjadi adalah evaluasi dari keberadaan kurikulum sebelumnya sehingga mengikuti kebutuhan pasar dan mampu mengembangkan potensi masing-masing individu. Kurikulum yang kini digunakan lebih menekankan pada siswa sebagai pusat dari keseluruhan kegiatan pembelajaran. Peran yang sangat dominan ditekankan pada siswa untuk mampu mengembangkan segala potensi kreativitas yang dimiliki oleh masing-masing individunya. Perbedaan yang sangat signifikan dengan ditetapkannya kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib, dituangkan dalam Permendikbud No. 63 tahun 2014 tentang Ekstrakurikuler Wajib Pramuka. Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib ini digunakan sebagai pembentukan karakter salah satunya adalah upaya bela negara, dimana siswa sebagai warga negara dilatih untuk memiliki kehidupan yang sejahtera melalui pembangunan kepribadian serta pengembangan kompetensi. Setiap pembelajaran kepramukaan dikembangkan berbagai aspek yang mendukung pengembangan kompetensi diantaranya aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Pengembangan aspek dalam kepramukaan ini disusun sesuai dengan tingkatan-tingkatan dalam tahap perkembangan siswa yang tersusun dalam syarat kecakapan umum sebagai panduan kurikulum yang berlaku secara nasional. Pemuatan kurikulum ini mampu dikembangkan berdasarkan sumber daya dan fasilitas pendukung sesuai dengan kebutuhan di sekolah.

Implementasi Permendikbud No. 63 tahun 2014 ini berkesinambungan dengan berbagai mata pelajaran di sekolah dasar maupun menengah, terutama dalam mata pelajaran IPS, karena kegiatan kepramukaan ini berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar (alam) dan lingkungan masyarakat (sosial). Tidak heran melalui pendidikan kepramukaan mampu meningkatkan rasa kepedulian sosial yang tinggi

dan berwawasan luas sehingga pengetahuan dan pengalaman siswa mampu terasah secara optimal (Saputri, 2019, hlm. 7-8). Jika ditinjau dari ruang lingkupnya pembelajaran IPS meliputi manusia, tempat dan lingkungannya, dengan segala gejala dan tingkah lakunya seperti cara bagaimana memanfaatkan sumber daya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup serta cara menjaga keberlangsungan hidup di masa yang akan datang. Hal ini senada dengan peran besar gerakan Pramuka dalam pembentukan kepribadian generasi muda agar mampu mengendalikan diri dan memiliki kecakapan hidup. Pembentukan kepribadian tersebut mampu menjadi modal sekaligus potensi yang tinggi bagi keberlangsungan negara demi mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Kemampuan kepribadian sebagai modal utama baik dalam pendidikan kepramukaan maupun mata pelajaran IPS adalah bagaimana seorang warga negara mampu memiliki kecakapan dalam berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi mengingat persaingan tidak hanya pada tataran lokal saja, tetapi sampai pada tingkat nasional maupun global (Susanto, 2014, hlm. 22).

Pendidikan kepramukaan dan IPS berperan sebagai pembentuk jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia yang bertanggungjawab, sadar hak dan kewajiban sebagai warga negara, cinta tanah air sehingga mampu menampilkan sikap patriotik dalam wujud bela negara sebagai kekuatan dalam mempertahankan sistem pertahanan negara. Upaya dalam mewujudkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan segala ancaman yang mengganggu keutuhan dan keamanan bangsa dan negara bergantung pada generasi muda sebagai pemegang tongkat keberlangsungan negara selanjutnya. Dimana keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara diwujudkan dalam setiap kemampuan yang dioptimalkan untuk kepentingan negara melalui usaha-usaha yang dilakukannya terhadap pertahanan negara.

Berdasarkan tinjauan antara IPS dengan pendidikan kepramukaan, mampu dikombinasikan sebagai pengembangan upaya bela negara siswa melalui materi IPS dengan metode kepramukaan yang menyenangkan, interaktif dan progresif. Metode tersebut dikemas melalui permainan yang berorientasi pada pendidikan, melatih sekaligus mengembangkan kemampuan siswa, serta mampu melakukan

pengabdian pada masyarakat (Permendikbud No. 63 tahun 2014, Pasal 3). Selain itu, proses pendidikan ini didasarkan pada sistem *among* dimana siswa dilatih untuk berjiwa merdeka, disiplin, mandiri dalam melakukan interaksi antarmanusia, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup (Pasal 10 dan Pasal 11, Permendikbud No. 63 tahun 2014).

Indonesia memiliki potensi melalui pendidikan dan kepramukaannya. Dimana setiap orang yang pernah mengenyam pendidikan baik dasar maupun menengah pernah menjadi seorang Pramuka sehingga Indonesia digolongkan menjadi negara terbanyak Pramuka dari segi kuantitas (Citta, 2017). Jumlah Pramuka Indonesia pada tahun 2017 menurut data WOSM (*World Organization of the Scout Movement/ Organisasi Kepanduan Sedunia*) adalah sejumlah 21.842.404 orang dengan rasio 1:5 (satu dari lima anak muda Indonesia adalah seorang Pramuka). Modal besar melalui pendidikan kepramukaan tersebut mampu menyokong upaya pembinaan kesadaran bela negara sebagai upaya untuk mewujudkan warga negara Indonesia yang memahami dan menghayati serta yakin atas penunaian hak dan kewajibannya. Namun, pelaksanaan Ekstrakurikuler Wajib Pramuka di lapangan tidak mudah dalam mencapai tujuan yang ideal, karena tidak semua sekolah memahami maksud adanya Ekstrakurikuler Wajib Pramuka. Dimulai dengan tidak adanya program rancangan tahunan pendidikan kepramukaan, dimana hal tersebut menjadi panduan satu tahun dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan. Daya dukung sekolah terhadap Ekstrakurikuler Wajib Pramuka yang cenderung menjadikan formalitas sehingga persiapan daya dukung (sumber belajar dan sarana prasarana) terhadap kegiatan tidak optimal. Keberadaan hambatan tersebut menjadikan siswa kurang meminati Ekstrakurikuler Wajib Pramuka sehingga bolos dari kegiatan karena tidak tercapainya pendidikan kepramukaan yang menyenangkan dan interaktif. Selain itu, di lapangan tidak terdapat pengawasan yang ketat mengenai penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Jika pendidikan kepramukaan secara teknis belum terselenggara sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 dan Permendikbud No.63

tahun 2014 maka upaya bela negara yang terkandung tidak akan tersampaikan dengan optimal.

Apabila kesadaran dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan mampu ditingkatkan oleh semua pihak, maka bela negara tersebut akan mewujudkan Indonesia kearah peradaban yang unggul dan mulia sehingga terciptanya masyarakat dan bangsa baik (*good society and nation*), damai, adil, dan sejahtera. Sebagaimana hal tersebut telah diwasiatkan oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945. Diharapkan dengan dibentuknya kepramukaan sebagai bagian wajib dari pendidikan mampu menciptakan warga negara yang memiliki sikap menentang segala bentuk penjajahan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud membuat sebuah penelitian dengan judul “**Implementasi Permendikbud No 63 Tahun 2014 Tentang Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Dalam Upaya Bela Negara Siswa (Studi Deskriptif Di SMPN 1 Samarang Kabupaten Garut)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan, maka rumusan masalah umum yaitu :

1. Bagaimana pemahaman guru di SMP Negeri 1 Samarang terhadap isi Permendikbud No. 63 tahun 2014 tentang Ekstrakurikuler Wajib Pramuka?
2. Bagaimana implementasi Permendikbud No. 63 tahun 2014 tentang Ekstrakurikuler Wajib Pramuka di SMP Negeri 1 Samarang?
3. Bagaimana sikap bela negara yang muncul setelah adanya implementasi Permendikbud No. 63 tahun 2014 tentang Ekstrakurikuler Wajib Pramuka?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sejauhmana pemahaman guru di SMP Negeri 1 Samarang mengenai Permendikbud No. 63 tahun 2014 tentang Ekstrakurikuler Wajib Pramuka

2. Mengetahui implementasi Permendikbud No. 63 tahun 2014 tentang Ekstrakurikuler Wajib Pramuka di SMP Negeri 1 Samarang
3. Mengetahui sikap bela negara yang muncul setelah adanya penerapan Permendikbud No. 63 tahun 2014 tentang Ekstrakurikuler Wajib Pramuka

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang telah penulis susun ini pada intinya berhubungan meningkatkan upaya bela negara siswa melalui ekstrakurikuler Pramuka. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat
 - a) Mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya meningkatkan bela negara siswa melalui ekstrakurikuler Pramuka.
 - b) Diketuainya upaya-upaya dari setiap sekolah dalam pembentukan sikap bela negara siswa.
2. Bagi Peneliti
 - a) Dapat mengetahui dampak yang timbul dari kepramukaan dalam pembentukan sikap bela negara siswa.
 - b) Dapat turut serta membangun kepedulian masyarakat untuk ikut membangun stimulus sebagai bagian dari peningkatan bela negara.
3. Bagi Pemerintah
 - a) Dapat meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan
 - b) Dapat menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan yang akan dilaksanakan.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi ini berisi mengenai rincian urutan penelitian dari setiap bab dan bagian demi bagian dalam skripsi. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil temuan dan bahasan serta kesimpulan, rekomendasi dan saran.

Bab I merupakan bagian awal dari skripsi yang berisi lima bagian. Bagian ini berisikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

Bab II berisikan kajian pustaka. Kajian pustaka berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Kajian pustaka berisi mengenai tinjauan umum tentang Permendikbud No. 63 tahun 2014, Kepramukaan dan Bela Negara.

Bab III berisi penjabaran mengenai metode penelitian dan komponen pendukung lainnya, seperti lokasi dan subjek penelitian, pendekatan dan metode penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan bab yang berisi mengenai pemaparan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini terdiri dari dua hal utama, yakni deskripsi hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V merupakan bab terakhir yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan penulis terhadap hasil analisis temuan penelitian. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

